

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

(Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota)

Agus Setiaman, Dadang Sugiana, Jimi Narotama M.

Departemen Ilmu Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada sipencarinya, seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuah program baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan. Kemampuan penyelenggara pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai, akan memudahkan masyarakat memberikan kontribusi atau partisipasi secara positif. Masyarakat tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur seandainya mereka mudah mendapatkan informasi yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belkum memahmai keterbukaan informasi publik, bahkan sebagian besar warga Kota belum atau kurang mehami bentuk informasi yang digunakan oleh Pemkot sebagai upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Sebagian warga Kota tahu bahwa setiap ada pekerjaan pembangunan sarana publik tersedia pengumuman tentang batas waktu pengerjaan, biaya, dan sebagainya tapi mereka tidak tahu bahwa hal itu sebagai bagian dari kebijakan keterbukaan informasi publik dari pemegang kebijakan publik kepada warganya. Masih kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman warga Kota terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota dalam implementasi keterbukaan publik.

Kata-kata kunci: Keterbukaan informasi, pemanfaatan informasi, pemerintah, kebijakan

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY

ABSTRACT

The needs of information level will grow if there is a benefit for the information seeker. Problem solving, new ideas, knowledge neediness, or creating an observation for an ongoing process are some of the examples of beneficial information for information seekers. The capability of government officials to prepare information availability with the sufficient infrastructure and content, along with the openness attitude and the right mechanism and procedure, will generate effortless positive public contribution or participation. Public will not be dragged easily into vague issue and information, if they receive sufficient information. Research shows that most people in Bandung City have not or yet to understand the public information openness. Most people in Bandung City also have not or yet to understand the form of information used by Bandung City Government to implement the public information openness. Some of the people of the city know about work on public facilities, the end date of the work, cost, etc., but they do not know for a fact, that all those information are part of the public information openness policy. Bandung City Government has not performed socialization on public information openness adequately, which resulted on the lack of public knowledge on public information openness policy.

Key Words: Open information, usage of information, government, policy.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturanaturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar.

Prinsip-prinsip *good governance* tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya, UU Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat pemerintah dan pemerintah daerah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik. Akan tetapi saat ini ditengarai masih banyak pemerintah daerah yang mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan asset daerah. Sementara akses warga masyarakat semakin terbatas, karena proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih mengedepankan gaya “patron-klien” antara elite birokrasi di pemerintahan dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan berbagai kebijakan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Sedangkan

warga masyarakat hanya dilibatkan pada tahap awal perencanaan program sebagai cara untuk mencari dukungan dan legitimasi, sementara pada proses berikutnya, warga masyarakat sangat sulit untuk dapat mengetahui dan atau memonitor berbagai produk kebijakan dan pelaksanaannya. Kondisi struktural yang dibangun pemerintah daerah seperti ini, akan menghambat terwujudnya partisipasi aktif dan substantif yang sesungguhnya dari warga masyarakat.

Eksistensi suatu pemerintahan tidak akan memadai hanya melalui pengakuan legalitas yuridis tanpa pengakuan dan partisipasi aktif warga masyarakatnya. Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Penduduk Kota Bandung (Maret, 2004) berjumlah: 2.510.982 jiwa dengan luas wilayah 16.729,50 Ha. (167,6 Km²), dengan tingkat kepadatan penduduknya per hektar sebesar 155 jiwa. Dengan jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kota Bandung, tentu tantangan yang tidak lagi mudah untuk mengelolanya sesuai amanat UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) dan peraturan perundangundangan lainnya, khususnya UU NO. 28 tahun 1999 pasal 9 ayat (3) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemilihan Kota Bandung sebagai objek penelitian karena Kota Bandung adalah Kota Jasa yang harus bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa.

Pemerintah Kota Bandung adalah Pemkot yang telah memiliki Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi bagaimana implementasi perda tersebut dalam persepsi warga kota dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi warga kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab semua tujuan besar tersebut melalui tujuan-tujuan mikro sebagai berikut:

Menjelaskan bentuk informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota

Menjelaskan relasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam imple-

mentasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota

Menjelaskan identifikasi kebutuhan informasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota

Menjelaskan eksplorasi kebutuhan informasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota

Menjelaskan optimalisasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi keterbukaan informasi publik kepada warga kota.

METODE PENELITIAN

Analisis adalah pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca, serta menerangkan sesuatu atau memberikan deskripsi terhadap sesuatu (Nazir, 1987: 71). Data yang diperoleh dalam penelitian ini diakumulasikan dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis. Analisis yang digunakan adalah deskriptif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data yang terkumpul untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2002: 112). Teknik ini memaparkan jawaban responden dalam bentuk tabel frekuensi dan presentase. Tabel-tabel tersebut selanjutnya disertai interpretasi penulis mengetahui makna dari data-data penelitian tersebut. Perhitungan presentase dalam tabel frekuensi dihitung berdasarkan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana:

P = Presentase frekuensi

f = Frekuensi kelas

n = Ukuran sampel.

(Supranto, 2000: 63)

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kota Bandung. Sedangkan tehnik penarikan sampling yang digunakan adalah *Multistage Sampling*. Berdasarkan pembagian wilayah administratif Kota Bandung terbagi ke dalam empat wilayah yaitu wilayah Bandung Timur, Bandung Utara, Bandung Tengah dan Bandung Selatan. Setiap wilayah terdiri dari beberapa kecamatan dan dari kecamatan terbagi kedalam beberapa kelurahan dan seter-

usnya sehingga sampai pada satuan pemerintahan terkecil yaitu rukun tetangga (RT).

Dari empat wilayah di Kota Bandung terpilih Wilayah Bandung Utara kemudian di ambil dua kecamatan yaitu Kecamatan Coblong dan Kecamatan Sukajadi dari dua kecamatan diambil satu kelurahan secara acak sederhana dan dari kelurahan terpilih di ambil masing-masing satu RW.

Gambaran lebih detail dijelaskan pada tahapan berikut ini:

Tahap 1:

Kota Bandung terdiri dari empat wilayah yaitu: Wilayah Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Utara dan Bandung Selatan, dari hasil pemilihan secara acak maka terpilih Bandung Utara.

Tahap 2:

Bandung Utara terdiri dari beberapa kecamatan dan berdasarkan pemilihan maka terpilih dua kecamatan yaitu: Kecamatan Coblong dan Kecamatan Sukajadi.

Tahap 3:

Dari dua kecamatan di Bandung Utara yang terpilih untuk selanjutnya dipilih secara random kelurahan mana yang akan dijadikan sampling dan terpilih Kelurahan Cipaganti dan Kelurahan Cipedes.

Tahap 4:

Untuk selanjutnya maka dipilihlah dua RW dari masing-masing kelurahan yang selanjutnya dijadikan sampling dalam penelitian ini.

Sumber data penelitian adalah warga di dua Kelurahan dan lebih khususnya lagi rukun warga terpilih yang ada di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Coblong dan Kecamatan Sukajadi (frekuensi dan presentase secara deskriptif).

Kuesioner dipilih sebagai alat pengumpulan data, mengingat instrumen ini akan memberikan data yang cepat, jumlah yang cukup besar dan memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang dapat dikontrol atau dijaga oleh peneliti. Peneliti akan berupaya mengembangkan pertanyaan penelitian berdasarkan pada operasionalisasi konsep-konsep yang akan diukur. Dalam hal ini mencoba menjabarkan konsep tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pandangan dan penilaian warga kota tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Sebelum dilakukan penelitian. Hal pertama dilakukan yaitu menguji kevaliditasan angket

yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, yang masuk ke dalam sampel, kemudian dilakukan pengujian terhadap kuesioner untuk mengukur tingkat kebaikan kuesioner, maka kita dapat melakukan analisis validitas dan reliabilitas kuesioner.

Dengan menggunakan skala sikap, validitas yang dipakai untuk menguji hasil penelitian adalah validitas konstruksi, digunakan untuk mengetahui hubungan variabel penelitian dengan konsep dalam kerangka teori. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan pengujian validitas konstruksi yaitu (1) melihat berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu melalui para ahli, studi kepustakaan dan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur, (2) melakukan uji coba alat ukur tersebut pada sejumlah responden dengan mempersiapkan tabel tabulasi jawaban, dan (3) menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pertanyaan dan skor total dengan memakai rumus product moment (Arikunto dalam Kriyantono, 2007: 147).

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval. Skala interval adalah skala yang berdasarkan jarak yang memiliki nilai tertentu. Untuk menentukan hasil penelitian yang baik dan ilmiah, alat ukur yang digunakan juga harus dipastikan secara konsisten memberikan hasil yang sama walaupun dilakukan berulang kali terhadap kondisi atau gejala yang sama. Keputusan validitas dan reliabilitas item menggunakan kriteria Kaplan (1993: 141), sebagai berikut:

Item dinyatakan valid jika koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0.3

Kelompok item dalam suatu dimensi dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitasnya tidak lebih rendah dari 0.7

Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Tingkat validitas kuesioner diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan koefisien korelasi item-total yang terkoefisien.

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempun-

nyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Setiap item yang digunakan untuk mengukur karakteristik responden harus memiliki presisi yang tinggi dalam pengukuran variabel yang akan diteliti.

Pengukuran validitas pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi Rank Spearman. Bila terdapat jumlah besar angka sama, menggunakan rumus sebagai berikut:

dimana:

r_s = koefisien korelasi rank Spearman

d_i = selisih ranking X dan Y untuk setiap

dengan:

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x$$

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y$$

$$t = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}}$$

jumlah n

S = sigma atau jumlah

N = jumlah individu dalam sampel uji validitas (98 responden)

t = banyaknya data berpangkat sama pada suatu ranking tertentu

T_x = jumlah korelasi X

T_y = jumlah korelasi Y

(Siegel, 1992: 256-257)

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Menurut Kaplan, kelompok item dalam suatu dimensi dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitasnya tidak lebih rendah dari 0.7. Rumus yang digunakan yaitu koefisien Spearman Brown:

Dimana mencari nilai r_s dengan menggunakan rumus korelasi Pearson.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agus-

$$r_{tot} = \frac{2r_s}{1+r_s}$$

tus – Desember 2013, adapun yang menjadi tempa dalam penelitian ini adalah Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Coblong Kota Bandung.

$$r_s = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis review data persepsi warga kota Bandung terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik, dikumpulkan melalui data dokumen keterbukaan informasi publik yang diperoleh melalui berbagai sumber termasuk wawancara dan FGD dengan berbagai pihak. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan terhadap data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada wilayah objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner di wilayah Kelurahan Cipaganti Kota Bandung Jawa Barat. Responden yang terjaring sebanyak 78 orang yang keseluruhannya mengisi kuesioner dengan lengkap, sehingga data yang diolah menjadi bahan dasar data penelitian adalah seluruh responden tersebut. Deskripsi responden dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Jenis Kelamin Responden Kelurahan Cipaganti

Jenis Kelamin	f	%
Laki-laki	23	29.5
Perempuan	55	70.5
Total	78	100.0

Tabel tersebut menunjukkan mayoritas responden berdasarkan dari jenis kelamin pada

penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 23 orang (29.5%) dan responden perempuan sebanyak 55 orang (70.5%). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi adalah kelompok perempuan sehingga persepsi tentang keterbukaan publik lebih banyak berdasarkan persepsi kelompok perempuan. Fakta lain menunjukkan bahwa berdasarkan kalkulasi jumlah penduduk Indoensia pada umumnya perempuan berada dalam kelompok yang dominan dibandingkan dengan kelompok laki-laki.

Tabel 2 Umur Responden Responden Kelurahan Cipaganti

Umur	f	%
17-25	13	16.7
26-35	21	26.9
36-45	25	32.1
46-55	13	16.7
56-65	6	7.7
Total	78	100.0

Berdasarkan tabel di atas, karakteristik responden dilihat dari tingkatan umur sangat beragam mulai dari dengan responden terkecil terdapat pada rentang umur 56-65 tahun sebanyak 6 orang atau 7.7%. Sedangkan responden terbanyak dalam penelitian ini berada pada rentang umur 36-45 tahun sebanyak 25 orang atau 32,1% dari total responden. Sebagian responden berada dalam usia produktif dan hanya sebagian kecil yang berada dalam kelompok non produktif.

Tabel 3 Pekerjaan Responden Responden Kelurahan Cipaganti

Pekerjaan	f	%
PNS/TNI-Polri	1	1.3
Pegawai Swasta	19	24.4
Wiraswasta	11	14.1
Pensiunan	3	3.8
Lainnya	44	56.4
Total	78	100.0

Tabel 3 menunjukkan mayoritas para responden bekerja di sektor lainnya sebanyak 44 orang responden (56,4%), kemudian diikuti oleh responden yang bekerja di sektor swasta dengan profesi sebagai pegawai swasta sebanyak 19 orang responden (24,4%) ataupun wiraswasta/usahawan sebanyak 11 orang responden (14,1%). Selebihnya profesi dari responden dalam penelitian ini berturut-turut mulai dari yang terkecil, yaitu: responden dengan profesi Pensiunan dengan jumlah responden sebanyak 3 orang (3,8%) serta responden yang berprofesi sebagai PNS/TNI-POLRI hanya terdapat 1 orang responden (1,3%).

Tabel 4 Tingkat Pendidikan Responden Kelurahan Cipaganti

Tingkat Pendidikan	f	%
Tamat SD	3	3.8
Tamat SLTP	8	10.3
Tamat SLTA	49	62.8
Diploma	8	10.3
Sarjana	10	12.8
Total	78	100.0

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas pendidikan pendidikan akhir para responden adalah tamta SLTA sebanyak 49 orang responden (62,8%), selanjutnya responden terbanyak ke dua pada tingkatan pendidikan Sarjana sebanyak 10 orang responden (12,8%) lalu diikuti selanjutnya oleh responden pada tingkatan pendidikan tamatan SLTP dan Diploma sebanyak masing-masing 8 orang responden (10,3%). Responden dengan tingkat pendidikan tinggi terendah yaitu tamatan SD sebanyak 3 orang (3,8%).

Tabel 5 Status Perkawinan Responden Kelurahan Cipaganti

Status	f	%
Belum Kawin	13	16.7
Kawin	62	79.5
Pernah Kawin	3	3.8
Total	78	100.0

Berdasarkan tabel sebelumnya, mayoritas responden berdasarkan status perkawinan menunjukkan bahwa responden sebagian besar telah kawin sebanyak 62 orang (79.5%) kemudian diikuti oleh responden yang berstatus belum menikah sebanyak 13 orang (16.7%), dan yang terakhir adalah responden yang pernah kawin tetapi sekarang tidak kawin sebanyak 3 orang (3.8%). Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian responden berada dalam kategori sebagai orang yang telah dewasa yang dapat memilih dan memilah mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak usah dilakukan, kelompok orang yang telah memiliki pertimbangan tersendiri.

Tabel 6 Kedudukan dalam Keluarga Responden Kelurahan Cipaganti

Kedudukan di Keluarga	f	%
Kepala Keluarga	23	29.5
Anggota Keluarga	55	70.5
Total	78	100.0

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden berdasarkan dilihat dari kedudukan dalam keluarga menunjukkan bahwa memiliki kedudukan sebagai anggota keluarga sebanyak 55 orang (70.5%) kemudian diikuti oleh responden yang kedudukannya sebagai kepala keluarga sebanyak 23 orang (29.5%). Sejalan dengan data yang ada di tabel sebelumnya bahwa responden dalam penelitian ini adalah 23 orang laki-laki yang memiliki posisi sebagai kepala keluarga, dan 55 orang adalah perempuan yang memiliki posisi sebagai anggota keluarga.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui penyabaran kuesioner di wilayah Kelurahan Cipedes Kota Bandung Jawa Barat. Responden yang terjaring sebanyak 53 orang yang keseluruhannya mengisi kuesioner dengan lengkap, sehingga data yang diolah menjadi bahan dasar data penelitian adalah seluruh responden tersebut. Deskripsi responden dapat dijabarkan di halaman berikut:

Tabel 7 Jenis Kelamin Responden Kelurahan Cipedes

Jenis Kelamin	f	%
Laki-laki	24	45.3
Perempuan	29	54.7
Total	53	100.0

Tabel di atas menunjukkan mayoritas responden berdasarkan dari jenis kelamin pada penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 24 orang (45.3%) dan responden perempuan sebanyak 29 orang (57.4%). Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok perempuan sebagai kelompok dominan dalam penelitian ini.

Tabel 8 Umur Responden Responden Kelurahan Cipedes

Umur	f	%
17-25	6	11.3
26-35	18	34.0
36-45	15	28.3
46-55	9	17.0
56-65	4	7.5
>65	1	1.9
Total	53	100.0

Berdasarkan tabel di atas, karakteristik responden dilihat dari tingkatan umur sangat beragam mulai dari dengan responden terkecil terdapat pada rentang umur lebih 65 tahun sebanyak 1 orang atau 1.9%. Sedangkan responden terbanyak dalam penelitian ini berada pada rentang umur 26-35 tahun sebanyak 18 orang atau 34% dari total responden.

Sebagian besar responden dalam penelitian ini berada dalam kategori usia produktif sehingga diharapkan persepsi yang disampaikan sebagai hal yang kritis, konstruktif dan dinamis, sesuai dengan kriteria usia produktif yang aktif, dinamis dan kritis.

Tabel 9 Pekerjaan Responden Responden Kelurahan Cipedes

Pekerjaan	f	%
PNS/TNI-Polri	5	9.4
Pegawai Swasta	10	18.9
Wiraswasta	18	34.0
Pensiunan	3	5.7
Lainnya	17	32.1
Total	53	100.0

Tabel di atas menunjukkan mayoritas para responden bekerja di sektor wiraswasta sebanyak 18 orang responden (34%), kemudian diikuti oleh responden yang bekerja di sektor lainnya sebanyak 17 orang responden (32.1%). Selebihnya profesi dari responden dalam penelitian ini berturut-turut mulai dari yang terkecil, yaitu: responden dengan profesi Pensiunan dengan jumlah responden sebanyak 3 orang (5,7%) serta responden yang berprofesi sebagai PNS/TNI-POLRI hanya terdapat 5 orang responden (9.4%).

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat 32,1% yang memiliki pekerjaan diluar pegawai swasta, PNS/TNI-POLRI maupun pensiunan, dan berdasarkan hasil wawancara responden bekerja sebagai pedagang, petani dan ibu rumah tangga biasa.

Tabel 10 Tingkat Pendidikan Responden Kelurahan Cipedes

Tingkat Pendidikan	f	%
Tamat SD	2	3.8
Tamat SLTP	10	18.9
Tamat SLTA	25	47.2
Diploma	5	9.4
Sarjana	8	15.1
Magister/S2	2	3.8
Doktor/S3	1	1.9
Total	53	100.0

Berdasarkan tabel 10, mayoritas pendidikan pendidikan akhir para responden adalah tamatan SLTA sebanyak 25 orang responden (47,2%), selanjutnya responden terbanyak ke dua pada responden dengan tingkatan pendidikan tamatan SLTP sebanyak 10 orang (18.9%) dan banyak pula responden yang telah mengenyam pendidikan tinggi mulai dari jenjang Diploma/Sarjana/Magister dan Doktor sebanyak 6 orang responden. Responden dengan tingkat pendidikan tinggi terendah yaitu tamatan SD sebanyak 2 orang (3,8%). Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden bersifat variatif mulai dari tamat SD sampai dengan lulusan doctor, sehingga perspsi yang muncul dalam keterbukaan informasi publik ini bersifat mewakili dari berbagai strata pendidikan dan latar belakang yang berbeda-beda.

Tabel 11 Status Perkawinan Responden Kelurahan Cipedes

Status	f	%
Belum Kawin	5	9.4
Kawin	44	83.0
Pernah Kawin	4	7.5
Total	53	100.0

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden berdasarkan status perkawinan menunjukkan bahwa responden sebagian besar telah kawin sebanyak 44 orang (83%) kemudian diikuti oleh responden yang berstatus belum menikah sebanyak 5 orang (9.4%), dan yang terakhir adalah responden yang pernah kawin tetapi sekarang tidak kawin sebanyak 4 orang (7.5%). Sebagian besar responden berada dalam kategori dewasa dalam arti telah atau pernah berkeluarga sehingga termasuk dalam kelompok masyarakat yang mandiri secara psikologis.

Tabel 12 Kedudukan dalam Keluarga Responden Kelurahan Cipedes

Kedudukan di Keluarga	f	%
Kepala Keluarga	25	47.2
Anggota Keluarga	28	52.8
Total	53	100.0

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden berdasarkan dilihat dari kedudukan dalam keluarga menunjukkan bahwa responden yang memiliki kedudukan sebagai anggota keluarga sebanyak 28 orang (52.8%) kemudian diikuti oleh responden yang kedudukannya sebagai kepala keluarga sebanyak 25 orang (47.2%). Sejalan dengan data sebelumnya bahwa sebagian besar responden berada dalam kategori anggota keluarga karena mereka adalah kelompok perempuan yang menjadi pendamping suaminya sebagai kepala keluarga mereka.

Analisis Data Kualitatif terhadap bentuk informasi yang diberikan Pemerintah Kota Bandung diantaranya (1) berdasarkan analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa bentuk informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung masih dipersepsi sebagai bentuk yang tidak menarik, cenderung monoton dan miskin kreatifitas sehingga terkesan membosankan untuk dilihat, (2) penggunaan media-media papan pengumuman, baligo, atau pun media luar ruang lainnya cenderung dianggap sebagai pengumuman biasa dan bukan dipersepsi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, dan (3) penggunaan media internet sebagai pusat layanan informasi Pemerintah Kota Bandung masih belum cukup diapresiasi dan digunakan secara optimal oleh warga Kota, kalau ada masalah dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung terdapat kecenderungan warga Kota untuk berdiam diri atau menerima begitu saja, hal ini bisa jadi karena kekurangan tahanan warga kota untuk menyampaikan keluhan atau masalahnya kepada siapa. Bentuk apatisisme seperti ini tentu saja bisa berbahaya karena tidak menumbuhkan prinsip cek and balance, sementara dalam era demokrasi penyelenggara Negara membutuhkan saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Analisis Data Kualitatif terhadap relasi kemitraan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung diantaranya (1) berdasarkan analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung belum optimal dalam membangun relasi kemitraan dengan kelembagaan di tingkat kelurahan atau satuan terkecil lainnya secara optimal. Dalam desiminasi atau penyebaran informasi atau keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Bandung lebih banyak membangun kemitraan dengan menggunakan jalur birokrasi yang ada, (2) relasi kemitraan

perlu dibangun dan diberdayakan secara optimal karena kelembagaan yang ada memiliki hubungan yang relatif “lebih dekat”, memiliki hubungan yang relatif lebih “emosional”, sehingga informasi yang diberikan akan jauh lebih “didengar”, “dipahami” dan “diikuti”, dan (3) di setiap wilayah RT/RW sebetulnya telah ada mitra-mitra pemerintah Kota baik yang bersifat formal ataupun informal, maka diseminasi informasi tentang kebijakan keterbukaan informasi dapat disampaikan lebih efektif dan efisien.

Analisis Data Kualitatif terhadap identifikasi kebutuhan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung diantaranya (1) mengacu pada data kuantitatif seperti yang dijelaskan pada pembahasan diatas menunjukkan bahwa warga kota membutuhkan informasi tentang berbagai masalah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan baik dalam tahap rencana, pelaksanaan bahkan evaluasinya, (2) informasi yang diberikan seringkali kurang dipahami oleh warga kota karena informasi yang diberikan seringkali bersifat teknis, atau procedural teknis yang seringkali menyulitkan dalam memahami informasi seperti itu, (3) pemberian informasi yang teknis, yuridis, dan birokratis bersifat kaku (rigid) sehingga seringkali kurang menarik, menjemukan, sehingga sering dianggap tidak penting atau masa bodoh, (4) kebutuhan informasi bagi warga kota adalah informasi yang menarik, jelas, ringkas dan tidak bertele-tele atau to the point disajikan dengan menggunakan gambar-gambar yang lucu dan berwarna, dan (5) warga kota berharap bahwa Pemerintah Kota dapat mengikuti perkembangan keinginan dan harapan warga kota dalam setiap kebijakan pemerintah Kota Bandung sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dapat diapresiasi oleh warga kotanya.

Analisis Data Kualitatif terhadap eksplorasi kebutuhan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung diantaranya (1) berdasarkan analisis kuantitatif seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa persepsi warga kota terhadap eksplorasi kebutuhan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung selama ini dianggap masih minim, (2) warga kota membutuhkan informasi yang menunjukkan keterbukaan informasi tentang penggunaan anggaran dan besaran anggaran yang digunakan sehingga bisa menilai kelayakan proyek dengan besaran anggaran yang

digunakan, (3) warga kota menginginkan bahwa keterbukaan informasi dapat menjadi sebuah tradisi penyelenggara pemerintah sehingga pemerintahan yang berjalan adalah pemerintahan yang saling mengawasi dan saling mengisi, dan (4) kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana demokrasi yang bercirikan DARI, OLEH, dan UNTUK RAKYAT, benar-benar dapat diterapkan karena selama ini ada anggapan bahwa demokrasi hanya menitikberatkan pada DARI dan OLEH saja, karena UNTUK rakyat seringkali para penyelenggara pemerintah lupa atau pura-pura lupa.

Analisis Data Kualitatif terhadap optimalisasi sumberdaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung diantaranya (1) berdasarkan data kuantitatif yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih belum optimal dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki pemerintah kota, walaupun penggunaan relasi kemitraan masih banyak dilakukan melalui jalur birokrasi tapi masih saja hal itu belum juga optimal, (2) optimalisasi lembaga publik yang memberikan layanan informasi kepada warga kota masih juga belum optimal, padahal lembaga publik ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai tapi masih juga belum diapresiasi oleh warga kota, dan (3) perlu perubahan pola pikir di kalangan birokrat bahwa apartur pemerintah bukan dilayani tapi harus melayani warga kota dan hal ini bukan hanya di jadikan sebagai penghiasa bibir saja tapi betul diterapkan, dan untuk itu perlu dimulai dari birokrasi dikalangan atas dulu. Pemimpin perlu memberikan contoh bagi aparaturnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung masih belum maksimal dan cenderung informasi yang diberikan tidak menarik, kaku dan menjemukan. Pemerintah Kota Bandung lebih banyak menggunakan jalur birokrasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik kepada warga kotanya, relasi kemitraan dengan mengoptimalkan kelembagaan yang ada di tingkat kelurahan, RT/RW namun masih belum maksimal dilakukan. Identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Bandung masih belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kota. Hal ini, penyebabnya antara lain adalah Pemerintah Kota lebih banyak mempertimbangkan aspek legalitas formal dalam menyampaikan informasi, tentu saja ini sesuai dengan standart operasional prosedur yang ditetapkan tapi menjadi masalah bagi warga kota karena informasi yang diberikan seringkali dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan warga kota. Warga kota berharap bahwa keterbukaan informasi publik sebagai kebijakan yang akan mendukung proses demokrasi itu sendiri, yaitu sebagai pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Pemerintahan yang didukung dan di apresiasi oleh warganya, pemerintahan yang menekankan cek and *balance* dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintahan Kota Bandung masih belum optimal dalam pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran-saran yang peneliti dapat berikan antara lain sebaiknya Pemerintah Kota Bandung dalam menyampaikan informasi menggunakan media yang lebih variatif dan menggunakan bahasa gambar yang menarik dan lucu, serta mengoptimalkan kelembagaan baik yang formal maupun informal baik di tingkat RT/RW ataupun kelurahan dalam kebijakan keterbukaan informasi publik kepada warga kotanya.

Selain itu, sebaiknya kebijakan informasi publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung memperhatikan kebutuhan dan latar belakang pendidikan dan budaya yang ada di warga kotanya, juga melakukan sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi sehingga warga kota memahami dan mengapresiasi kebijakan yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Terakhir, sebaiknya Pemerintah Kota Bandung mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimilikinya, termasuk layanan informasi melalui internet yang selama ini masih belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaplan, M. R. Dennis, P. S. (1993). *Psychological testing principles, application, and issues*. Pacific Grove, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL. CO.
- Santosa, M. A. (2003). *Aktualisasi kebebasan informasi di indonesia; sebuah perjalanan panjang dan mendaki, dalam melawan ketertutupan informasi; menuju pemerintahan terbuka*. Jakarta: Koalisi Untuk Kebebasan Informasi.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Siegel, S. (1985). *Statistik non parametrik untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Singarimbun, M. & Effendi, S. (1995). *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3ES.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supranto. (2000). *Statistik teori dan aplikasi*, jilid 1, Edisi Ke-6. Jakarta: Erlangga.
- West, R. & Turner, L. H. (2007). *Introducing Communication theory, annalysis and application*, 3rd edition, Boston: McGraw Hill.
- Sabarno, H. (2007). *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang Undang No 28. Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara